

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Tentang Partisipasi Masyarakat

Sebelum membicarakan jauh tentang partisipasi masyarakat, terlebih dahulu kita meninjau terhadap masyarakat itu sendiri.

Walaupun beberapa ahli berpendapat bahwa masyarakat itu tidak dapat ditentukan dengan menentukan waktu dan tempat, karena mereka memandang masyarakat sebagai barang yang gaib, fiktif dan hanya ada dalam gambaran, namun sebagian dari mereka tidak keberatan untuk memberikan definisi, mereka mendefinisikan bahwa:

Masyarakat adalah golongan besar atau kecil terdiri dari beberapa manusia yang dengan atau sendirinya bertalian secara golongan dan pengaruh mempengaruhi satu sama lain.¹⁹

Apabila kita memperbincangkan tentang suatu masyarakat, biasanya yang dimaksud adalah kelompok orang yang memiliki kesamaan, dalam arti mereka berhubungan erat satu sama lainnya.²⁰

¹⁹Hassan Shadily, *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia*, Cet. IX, Bina Aksara, Jakarta, 1989, Hal. 47

²⁰Duncan Mitchelti, *Sosiologi Suatu Analisis Sistem Sosial*, Cet. I Bina Aksara, Jakarta, 1984, Hal. 46

Masyarakat adalah suatu kesatuan yang selalu berubah, yang hidup karena proses masyarakat yang menyebabkan perubahan itu. Dalam keadaan biasa masyarakat mengenal kehidupan yang teratur dan aman, disebabkan pengorbanan anggota-anggotanya, baik dengan paksa maupun sukarela. Pengorbanan disini maksudnya menahan hawa nafsu untuk mengutamakan kepentingan dan keamanan bersama. Sedang dengan sukarela, berarti menurut adat dan berdasarkan keinsafan akan persaudaraan dalam kehidupan bersama.

Pembagian masyarakat berdasarkan pada cara terbentuknya dapat dibedakan menjadi :

1. Masyarakat paksaan, misalnya masyarakat pengungsi, pelarian, tawanan dan sebagainya.
2. Masyarakat merdeka, terdiri dari :
 - a. Masyarakat alam, yaitu masyarakat yang terjadi dengan sendirinya, adanya pertalian golongan disebabkan ada hubungan darah atau keturunan. Umumnya masyarakat yang demikian kebudayaannya masih sangat sederhana, tidak mudah berhubungan dengan dunia luar (terpencil). Masyarakat yang demikian disebut *Gemeinschaft*.
 - b. Masyarakat budi daya, yaitu masyarakat yang terdiri karena kepentingan keduniaan atau kepercayaan (keagamaan), antara lain

kongsi perekonomian, koperasi dan sebagainya. Masyarakat yang demikian disebut dengan *Gesellschaft*.²¹

Hal-hal yang menyebabkan manusia tertarik untuk hidup bermasyarakat, antara lain :

1. Hasrat yang berdasar naluri (kehendak biologis yang berada diluar penguasaan akal) untuk mencari tempat hidup.
2. Berdasarkan pendapat Aristoteles, yang dikatakan bahwa manusia adalah *Zoon Politicon*, yaitu makhluk sosial yang hanya menyukai hidup bergolongan, atau setidaknya lebih suka mencari teman untuk hidup bersama dari pada hidup sendiri.
3. Menurut Bergson, manusia itu hidup bersama bukan oleh persamaan melainkan oleh karena perbedaan yang terdapat dalam sifat, kedudukan, dan sebagainya.²²

Demikian sekilas tinjauan kita tentang masyarakat. Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa sudah menjadi kudrat manusia untuk hidup bersama manusia yang lain, karena adanya jumlah persamaan dan perbedaan kebutuhan sesamanya. Masyarakat tidak mungkin bisa lepas dari kehidupan manusia itu sendiri.

²¹Hassan Shadily, *Op. Cit.* Hal. 50-51

²²Ibid. Hal. 51,56

1. Pengertian Partisipasi Masyarakat

Banyak orang berpendapat bahwa pembangunan masyarakat adalah suatu proses dimana masyarakat membahas dan merumuskan kebutuhan mereka bersama, merencanakan usaha pemenuhannya, dan melaksanakan rencana itu sebaik-baiknya. Pembangunan masyarakat ditujukan pada upaya untuk mengurangi kemiskinan, kemlaratan dan kebrokran lingkungan hidup masyarakat, karena hal demikian dapat menurunkan kualitas dan kelemahan semangat serta kemampuan masyarakat. Salah satu jalur untuk merealisasikan pembangunan adalah melalui lembaga pendidikan.

Sebagai salah satu elemen proses pembangunan masyarakat adalah adanya partisipasi. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan perlu dibangkitkan terlebih dahulu oleh pihak lain. Masyarakat hendaknya diminta dan diberi kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan. Untuk menghindari kesalahan persepsi kita, perlu diketahui apa yang dimaksud dengan partisipasi itu.

Para ahli memberikan definisi tentang partisipasi dalam tek yang berbeda-beda, namun pada hakekatnya sama. Inanabrota Bhattacharyya dalam buku "**Pembangunan Masyarakat**", mengartikan partisipasi sebagai



"Pengambilan bagian dalam suatu kegiatan bersama".²³

Mubyarto dalam buku yang sama mendefinisikanya "Sebagai kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai kemampuan setiap orang tampak berarti mengorbankan kepentinganya sendiri".

Secara lengkap T.B Simatupang memberika beberapa rincian tentang partisipasi, sebagai berikut :

- a. Berarti apa yang kita jalankan adalah bagian dari usaha bersama yang dijalankam bahu membahu dengan saudara kita sebangsa dan setanah air untuk membangun masa depan bersama.
- b. Partisipasi berarti pula sebagai kerja untuk mencapai tujuan bersama diantara semua warga negara yang mempunyai latar belakang kepercayaan yang beramneka ragam dalam negara Pancasila kita, atau dasar hak dan kuajiban yang sama untuk memberi sumbangan demi terbinanya masa depan yang baru dari bangsa kita.
- c. Partisipasi tidak hanya berarti mengambil bagian dalam pelaksanaan-pelaksanaan perencanaan pembangunan, melainkam memberi sumbangan demi terciptanya masa depan yang baru dari bangsa kita.
- d. Partisipasi dalam pembangunan berarti mendorong kearah pembangunan yang dengan martabat manusia. Keadilan sosial dan keadilan nasional yang memelihara alam sebagai lingkungan hidup manusia, juga untuk generasi-generasi yang akan datang.²⁴

Dari beberapa pengertian diatas, dapat di ketahui bahwa partisipasi masyarakat mengandung makna sebagai keterlibatan masyarakat dalam

²³Dr. Taliziduhu Ndraha, *Pembangunan Masyarakat*, Cetakan II, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, Hal. 102

²⁴Drs. Khairuddin H, *Masyarakat Pembangunan*, Cet. I, Liberty, Jakarta, 1992, Hal.124

mengambil peran serta baik secara moril maupun spirituil dalam suatu proses. Yang di maksud proses disini adalah proses pembangunan, dan proses pembangunan dalam pembahasan ini kita arahkan pada lembaga pendidikan (sekolah).

2. Indikator Partisiapsi Masyarakat

Setelah kita mengetahui pengertian dari partisipasi masyarakat, maka dalam hal ini ada beberapa masalah yang dapat dijadikan sebagai indikator partisipasi masyarakat, yang antara lain meliputi :

- a. Minat masyarakat dalam memasukkan anak-anak mereka pada sekolah keagamaan

Suatu sekolah tidak akan dapat berjalan apalagi berkembang jika tidak ada minat dari masyarakat untuk memasukkan putra-putra mereka pada sekolah tersebut. Merupakan salah satu unsur pendidikan adalah adanya peserta didik.

Adapun yang menjadi peserta didik dalam lembaga pendidikan formal yang terkenal dengan nama sekolah, ialah murid atau siswa. Siswa inilah yang menjadi obyek penelitian. Mereka inilah yang dipersiapkan suatu lembaga pendidikan dapat mengembangkan sayapnya, sementara masyarakat kurang antusias terhadap lembaga tersebut. Untuk

mendapatkan siswa ini, maka pihak pengurus atau penyelenggara pendidikan biasaya berusaha mendekati masyarakat, agar mereka memasukkan anak-anak mereka pada sekolahannya. Misalnya dengan meningkatkan kualitas pendidikannya, dan melibatkan masyarakat dalam proses pendidikan, dan sebagainya. Bagaimanapun lengkapnya sarana dan prasarana yang dimiliki kalau tidak menarik minat masyarakat, maka akan sia-sia belaka.

Sekolah yang tidak punya nama baik di mata masyarakat dan akhirnya mati adalah sekolah yang tidak mampu membuat hubungan baik dengan masyarakat penduduknya. Dengan berbagai sebab masyarakat tidak mau menyekolahkan putra-putra mereka pada sekolah tersebut, yang membuat sekolah yang bersangkutan tidak dapat siswa.²⁵

b. Sumbangan pemikiran terhadap pelaksanaan pendidikan

Pada dasarnya pendidikan itu dilaksanakan adalah untuk kepentingan masyarakat juga. Oleh karenanya, keterlibatan masyarakat terhadap perencanaan maupun pelaksanaan suatu pendidikan sangat diperlukan. Masyarakat harus menyadari bahwa pihak sekolah tidak mungkin mengambil kebijaksanaan sendiri terhadap penyelenggaraan pendidikan tanpa adanya bantuan dari masyarakat sekitarnya.

²⁵Dr. Made Pidarta, *Manajemen Pendidikan Islam*, Cet. I, PT. Bina Aksara, Jtk, 1988, Hal. 189

Para penyelenggara pendidikan selayaknya meminta masukan pada masyarakat, terutama orang-orang yang berkompeten dalam bidang pendidikan dan para tokoh masyarakat, bagaimana usaha-usaha mereka untuk memajukan pendidikan yang ada di desa mereka.²⁶

Masalah ini terutama bagi pendidikan yang ada di daerah pedesaan. Kebanyakan sekolah yang ada di desa adalah swasta, yang penyelenggaranya atas usaha yayasan atau organisasi masyarakat setempat. Jelas hal ini tidak bisa mengabaikan sumbagan pemikiran dari masyarakat untuk menegakkannya.

c. Rasa tanggung jawab moral terhadap pelaksanaan pendidikan

Keberhasilan suatu pendidikan tidak cukup dengan diserahkan pada guru disekolah saja. Pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara orang tua, pemerintah dalam hal ini pihak sekolah dan masyarakat.

Tanggung jawab masyarakat terhadap pendidikan sangat besar, karena lingkungan sekitar memberikan pengaruh yang mendalam terhadap pembentukan kepribadian terhadap anak.

Waktu yang dimiliki anak di sekolah hanya beberapa jam saja, selebihnya anak banyak belajar dari lingkungan tempat tinggalnya, yaitu dari orang tuanya dan masyarakat sekitarnya.

²⁶Ibid. Hal. 197

Oleh karena itulah, dengan didasari keihlasan yang tinggi, masyarakat harus menanamkan rasa tanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan dalam jiwa mereka. Dengan demikian, mereka dapat menikmati hasil pendidikan seperti apa yang dicita-citakannya.

Orang tua merasa berkewajiban membimbing putranya agar giat belajar, mengawasi perkembangan pribadi dan proses belajarnya, dan bila perlu memberi laporan atau konsultasi ke lembaga pendidikan.²⁷

Termasuk dalam kategori tanggung jawab disini adalah dalam pemenuhan fasilitas belajar anak, baik di rumah maupun di sekolah.

d. Menyediakan biaya yang diperlukan demi kelangsungan pendidikan

Biaya merupakan alat yang vital dalam melakukan suatu kegiatan, termasuk kegiatan pendidikan. Tanpa alat yang satu ini, bisa jadi kegiatan yang telah direncanakan secara matang sulit direalisasikan.

Akan tetapi dalam menyediakan dana ini sifatnya tidak memaksa, karena kemampuan masyarakat tidak sama dalam melaksanakan pendidikan anaknya, ada yang ekonominya tinggi, ada yang ekonominya tergolong cukup dan ada pula ekonominya yang tergolong dibawah cukup. Jadi dalam memberikan dana untuk kelangsungan pendidikan tidak dibatasi besarnya, sukarela sesuai dengan kemampuannya.

²⁷Dr. Made Pidarta, *Perencanaan Pendidikan Partisipatori*, Cet. II, Jakarta, Rineka Cipta, 1990, Halaman 36

Untuk memperoleh sumbangan dalam bentuk material, terlebih dahulu pihak sekolah berusaha memperoleh dukungan moral dari masyarakat. Kalau hal demikian sudah diperoleh, maka akan mudah bagi sekolah meminta dana tambahan dari mereka.²⁸

e. Keterlibatan secara fisik

Yang dikatakan partisipasi di sini tidak cukup dengan memberikan dana yang besar bagi masyarakat yang berekonomi tinggi, melainkan juga keterlibatan secara fisik demi kelangsungan pendidikan.

Sewaktu-waktu jika sekolah membutuhkan tenaga masyarakat, maka mereka dengan senang hati menyediakan waktu untuk memenuhinya, misalnya kerja bakti yang merupakan ciri khas masyarakat pedesaan, bersedia datang ke sekolah bila diundang, dan sebagainya.²⁹

3. Bentuk (Tahapan) Partisipasi Masyarakat

Berbicara tentang bentuk (tahapan) partisipasi, DR. Taliziduhu Ndraha menyebutkan sebagai berikut :

²⁸Prof. Dr. Made Pidarta, *Pemikiran Tentang Supervisi Pendidikan*, Cet. I, Bumi Aksara, Jakarta, 1992, Halaman 335

²⁹Ibid. Hal. 335

- a. Partisipasi melalui kontak dengan pihak lain (*contact change*) sebagai salah satu titik awal perubahan sosial.
- b. Partisipasi dalam perencanaan pembangunan, termasuk pengambilan keputusan.
- c. Partisipasi dalam pelaksanaan operasional pembangunan.
- d. Partisipasi dalam menerima, memelihara dan mengembangkan hasil pembangunan.
- e. Partisipasi dalam menilai pembangunan, yaitu keterlibatan masyarakat dalam meniali sejauhmana pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana dan sejauhmana hasilnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.
- f. Partisipasi dalam memahami dan memberi tanggapan terhadap informasi, baik dalam arti menerima (meaati, memenuhi, melaksanakan), menyetujui, menerima dengan syarat maupun dalam arti menolaknya.³⁰

Terhadap masalah ini, pembangunan yang dimaksud adalah pembangunan bangsa melalui lembaga pendidikan formal.

³⁰Dr. Taliziduhu Nrdaha, *Pembangunan Masyarakat*, Cetakan II, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, Halaman 103-104

Sedang partisipasi dibatasi pada partisipasi masyarakat terhadap kelangsungan pendidikan.

Dalam hal ini, Hoofstude sebagaimana yang dikutip oleh Drs. Khairuddin dalam buku "Pembangunan Masyarakat", membagi partisipasi menjadi tiga tingkatan, yaitu :

- a. Partisipasi Inisiasi (Inisiation Participation) yaitu partisipasi yang mengandung inisiatif dari seorang pimpinan baik secara formal maupun in formal mengenai suatu kegiatan.
- b. Partisipasi Legitimati (Legitemation Participation) yaitu partisipasi pada tingkat pembicaraan atau pembuatan keputusan mengenai kegiatan tersebut.
- c. Partisipasi Eksekusi (Execution Participation) maksudnya partisipasi pada tingkat pelaksanaan.³¹

Dari ketiga tahapan partisipasi diatas, partisipasi *inisiasi* mempunyai kadar yang lebih tinggi dibanding partisipasi legitimasi dan eksekusi. Disini penduduk tidak hanya sekedar menjadi obyek pembangunan saja, tetapi sudah dapat menentukan dan mengusulkan segala sesuatu rencana yang akan dilaksanakan. Sedang kalau masyarakat ikut hanya dalam tahap

³¹Drs. Khairuddin H, *Op. Cit.* Halaman 125

pembicaraan saja, seperti "rembung desa", padahal obyek yang dibangun sudah jelas wujudnya, maka masyarakat hanya berpartisipasi pada tingkat *legitimasi* saja. Sedangkan partisipasi *eksekusi* adalah yang terendah dari semua tingkatan partisipasi diatas. Masyarakat hanya turut serta dalam pelaksanaan, tanpa ikut serta menentukan dan membicarakannya.

Kita seharusnya menyadari bahwa pembangunan yang dilaksanakan adalah untuk kepentingan masyarakat itu sendiri. Rasa berkepentingan sebaiknya ditanamkan dalam diri masyarakat. Masyarakat tidak merasa memiliki kalau suatu pembangunan tidak mengikutsertakan mereka. Kementrian Pengarahan Tenaga Kerja dalam bukunya Khairuddin menyatakan :

Apabila kita berpendirian bahwa pelaksanaan pembanguna tidak ada orang lain yang harus melaksanakan selain masyarakat kita sendiri, maka dengan sendirinya pula harus di susun rencana pembangunan yang yang disusun oleh rakyat dan pemerintah bersama-sama. Memang amat sukarlah melaksanakan pembangunan apabila dalam perencanaanya rakyat tidak diikuti sertakan.³²

Berpijak dari pernyataan diatas, maka dapat dipahami pentingnya partisipasi untuk mengerakkan masyarakat. Rasa kesadaran dan tanggung jawab masyarakat mutlak di perlukan adanya dalam proses pembangunan, terutama masyarakat pedesaan yang merupakan bagian terbesar angkatan

³²Ibid.

kerja di Indonesia. Partisipasi masyarakat sebagai masukan pembangunan berfungsi untuk meningkatkan usaha perbaikan kondisi dan taraf hidup masyarakat yang tercermin dalam perubahan sikap mental.

4. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Tumbuhnya Partisipasi Masyarakat

Tidak semua masyarakat mempunyai kesadaran untuk ikut serta dalam proses pembangunan. Ternyata adanya kesadaran tersebut karena didorong oleh faktor-faktor tertentu yang ada dalam diri masing-masing individu.

Jika ditinjau dari segi motivasinya, faktor adanya partisipasi masyarakat adalah karena :

- a. Takut atau terpaksa.
- b. Ikut-ikutan.
- c. Kesadaran.³³

Partisipasi yang dilakukan dengan terpaksa atau takut biasanya akibat adanya perintah yang kaku dari atasan (*otoriter*), sehingga masyarakat seakan-akan terpaksa untuk melaksanakan rencana yang telah ditentukan.

DR. Astrid S.Susanto mengungkapkan bahwa "Di Indonesia banyak di

³³Ibid. Hal. 126

ketemukan situasi dimana petugas tidak mengerti isi instruksi atau bersikap "Asal Bapak Senang" (ABS), dan sering mengorbankan kepentingan lokal demi pelaksanaan tugasnya. Hal ini menjelaskan nilai dari petugas yang masih banyak bersifat tradisional dengan akibat banyak rakyat seakan-akan berpartisipasi, mereka di minta secara paksaan (*coercive*)

Sedang partisipasi dengan ikut-ikutan, hanya didorong oleh rasa solidaritas yang tinggi di antara sesama anggota masyarakat desa. Apalagi kalau yang memulai adalah pimpinan mereka, sehingga keikutsertaan mereka bukan karena dorongan hati sendiri, tetapi merupakan perwujudan kebersamaan saja, yang sudah merepakan kondisi sosial budaya masyarakat desa (misalnya : Gotong-royong).

Sedang motivasi partisipasi masyarakat yang ketiga, yaitu kesadaran. Partisipasi karena kesadaran adalah partisipasi yang timbul karena kehendak dari pribadi anggota masyarakat itu sendiri. Masyarakat melakukan suatu kegiatan dengan dilandasi oleh dorongan yang timbul dari hati nurani sendiri, bukan karena paksaan atau ikut-ikutan. Dalam hal ini masyarakat dapat menerima pembangunan karena mereka sadar bahwa pembangunan tersebut semata-mata untuk kepentingan mereka juga. Partisipasi yang didorong oleh rasa

kesadaran akan menbuahkan hasil yang lebih memuaskan, baik bagi pemimpin maupun bagi pihak masyarakat.

B. Tinjauan Tentang Perkembangan Pendidikan Keagamaan Tingkat Dasar

Di negara kita Indonesia ini ada dua macam lembaga pendidikan formal tingkat dasar, yaitu yang berada dibawah naungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang lebih dikenal dengan nama "Sekolah Dasar", yang lebih banyak memberikan pelajaran umum, dan lembaga pendidikan yang berada dibawah naungan Departemen Agama, yang lebih dikenal dengan nama "Madrasah Ibtidaiyah", yang bergerak dibidang agama Islam. Masing-masing lembaga tersebut ada yang negeri dan ada yang swasta. Lembaga pendidikan negeri adalah yang didirikan atas kehendak pemerintah dan dananya sebagian besar dari pemerintah juga. Sedang lembaga pendidikan swasta adalah yang berdirinya dilatarbelakangi oleh kehendak suatu organisasi atau masyarakat setempat. Yang akan dibicarakan dalam penulisan ini nanti adalah Madrasah Ibtidaiyah (MI).

1. Pengertian Perkembangan Pendidikan Keagamaan Tingkat Dasar

Sebelum lebih jelas diuraikan tentang apa yang dimaksud dengan pendidikan keagamaan tingkat dasar (Madrasah Ibtidaiyah), terlebih dahulu kita meninjau apakah perkembangan itu.

Terhadap masalah ini, Sumadi Suryabrata, memberikan pengertian yaitu : "Suatu perubahan, perubahan kearah yang lebih maju".³⁴

Maksud dari perkembangan dalam hal ini adalah kelangsungan dan kemajuan yang dialami oleh pendidikan keagamaan tingkat dasar di desa Kenanten Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto pada saat sekarang dibanding pada masa sebelumnya.

Sedangkan pendidikan keagamaan tingkat dasar (MI), sebagaimana dalam SKB tiga menteri (menteri agama, menteri pendidikan dan kebudayaan, dan menteri dalam negeri), mengartikan madrasah sebagai lembaga pendidikan yang menjadikan mata pelajaran agama Islam sebagai mata pelajaran dasar yang diberikan sekurang-kurangnya 30% disamping pendidikan umum.³⁵

³⁴Sumadi suryabrata, *Psikologi Pendidikan*, Cetakan.VI, Rajawali, Jakarta, 1991, Halaman 178

³⁵Drs. Abd. Rachman shaleh, *Penyelenggaraan Madrasah*, Jilid 2a, Cet. III, Dharma Bhkati, Jakarta, 1984, Hal. 18

Dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 99 tahun 1984 tentang kurikulum Madrasah Ibtidaiyah Bab 1 pasal 1, disebutkan bahwa "Madrasah Ibtidaiyah adalah satuan pendidikan tingkat dasar yang menjadikan pendidikan agama sebagai identitas kelembagaannya".

2. Faktor Penyebab Berkembangnya Pendidikan Keagamaan Tingkat Dasar

Dalam pembahasan ini diarahkan pada suatu pandangan pendidikan sebagai suatu gejala sosial. Ada beberapa teori tentang sistem pendidikan di Amerika yang dapat dijadikan acuan terhadap usaha mengembangkan pendidikan. sengaja pembahasan ini dikaitkan dengan sistem pendidikan yang terjadi di Amerika. Karena negara tersebut menjadi fokus karya deskriptif dan teoritis terbaik. Namun dalam perpektif yang luas teori-teori tersebut dapat digunakan sampai tingkat tertentu.

Dalam penulisan ini akan dikemukakan dua teori yang kami anggap ada keterkaitan dengan pembahasan yang kami angkat.

Pertama adalah teori konflik Weber, yang dikemukakan oleh Randall Collins (1979). Collins mengembangkan teorinya dengan melihat kelompok-kelompok status dalam masyarakat lebih penting

daripada kelas dalam pembentukan sistem pendidikan Amerika. Kelompok yang penting dalam masyarakat ialah kelompok etnis.

Collins memandang karakter pendidikan Amerika dan ekspansinya yang dramatis sepanjang abad yang lalu adalah akibat adanya keragaman etnik yang besar dalam masyarakat. Keragaman tersebut telah menimbulkan perjuangan dikalangan kelompok etnik itu untuk memperoleh hak-hak istimewa dan prestis. Dan kelompok yang dominan menjadi sistem pendidikan sebagai alat untuk mempertahankan keunggulan kebudayaan mereka.³⁶

Berkaitan dengan teori tersebut diatas, di desa Kenanten Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto ada dua kelompok besar, yaitu masyarakat yang tergabung dalam organisasi Nahdlotul Ulama' (NU) dan Muhammadiyah (MD). Kemungkinan berkembangnya madrasah tersebut karena adanya rasa persaingan untuk mempertahankan kebudayaan masing-masing. Sementara itu, Sekolah Dasar (Sekolah Umum) yang dipandang sebagai sekolah yang netral dari kedua kelompok itu dirasakan tidak masuk dalam persaingan, sehingga kurang mendapat perhatian dari masyarakat.

³⁶Stephen Sanderson, *Sosiologi Makro*, Cetakan I, Raja Rajawali, Pers, Jakarta, Hal. 305

Kedua adalah teori Pendidikan Sebagai Pembangunan Bangsa (Nation-Bulding). Teori ini dikembangkan oleh John Meyer dan teman-temannya. Dalam teori ini dikatakan bahwa :

Sistem pendidikan massal timbul dalam dunia modern secara khusus sebagai alat sosialisasi individu yang intensif kedalam nilai dan aspirasi negara-bangsa yang rasional dan modern. Dalam arti luas, pendidikan massal timbul sebagai suatu proyek yang disengaja untuk membangun pemerintah modern, membentuk individu-individu sesuai dengan kepatutan dan tujuan agama, politik dan ekonomi kolektif.³⁷

Dalam memahami perkembangan pendidikan Amerika sejak tahun 1870 sampai 1930, mereka menekankan pada pendidikan massal bahwa pendidikan massal selama waktu itu merupakan karakteristik pedesaan dan juga perkotaan, dan cenderung lebih penting di daerah desa. Karena itu pendidikan di motivasi oleh keinginan sagmen masyarakat, untuk mensosialisasikan anak-anak mereka ke dalam kebudayaan nasional baru yang sedang muncul.

Sejalan dengan hal diatas, masyarakat Kenanten Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto memandang pendidikan yang diselenggarakan oleh Madrasah Ibtidaiyah yang mampu mensosialisasikan anak-anak mereka ke dalam nilai dan aspirasi agama, negara dan bangsa.

³⁷Ibid.

3. Indikator Perkembangan Pendidikan Keagamaan Tingkat Dasar

Ada beberapa hal yang dapat dijadikan indikator perkembangan pendidikan keagamaan tingkat dasar yaitu :

a. Jumlah Murid

Suatu lembaga pendidikan, meskipun sarana prasarana yang tersedia lengkap tidak akan dapat berlangsung tanpa adanya murid. Keberadaan murid dalam lembaga pendidikan adalah sangat penting, karena merekalah yang menjadi obyek pendidikan. Murid yang banyak belum tentu dapat dikatakan pendidikan itu berkembang dengan pesat, tetapi setidaknya dengan murid yang banyak merupakan bukti besarnya minat masyarakat terhadap lembaga pendidikan tersebut, terutama bagi sekolah-sekolah tingkat dasar yang biasanya tidak menyertakan persyaratan bagi inputnya.

b. Sistem Pengajaran Yang Baik

Sistem pengajaran yang baik, jika selalu diadakan pembaharuan-pembaharuan yang mencakup bidang-bidang tertentu sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman, dengan ditunjang pelajaran-pelajaran tambahan dan kegiatan-kegiatan ekstra yang dapat dijadikan untuk menggali dan mengembangkan bakat yang dimiliki anak didik. Untuk

dapat mengadakan perbaikan terhadap penyelenggaraan pendidikan, maka diperlukan bimbingan teknis, yaitu supervisi. Jika pelaksanaan itu baik, maka kemungkinan besar mutu pendidikan pada suatu lembaga pendidikan itu akan semakin meningkat.

c. Sarana Prasarana Yang Memadai

Sarana dan prasarana diperlukan sebagai alat untuk melaksanakan pendidikan. Kurang lengkapnya sarana dan prasarana, maka pendidikan yang dilaksanakan belum dapat mencapai tujuan secara optimal. Saran adan prasarana yang semakin lengkap dapat memudahkan proses belajar mengajar, dan pengajaranpun lebih terarah. Karena pendidikan itu tidak cukup dalam bentuk teori-teori yang abstrak, melainkan harus dikongkritkan melalui praktek-praktek. berdasarkan tuntutan yang digariskan pada SKB tiga menteri, maka petugas pembinaan sekolah hendaknya

d. Kualitas Tenaga Gurunya

Jika kita lihat sehari-hari tugas guru adalah mengajar menyampaikan atau menanamkan ilmu pengetahuan kepada murid-muridnya, akan tetapi tugas guru bukan sekedar mengajar, melainkan juga berfungsi sebagai pendidik.³⁸

³⁸Ibid. Hal. 37

Untuk mendapatkan siswa yang berkualitas, tentu saja yang harus dinilai terlebih dahulu adalah kualitas tenaga pengajarnya (guru), karena merekalah yang bertugas menstafafer ilmu-ilmu yang dimiliki kepada anak didik. Seorang guru dituntut adanya sifat loyalitas, terutama guru pada sekolah tingkat dasar karena pada masa inilah pertama kali memperoleh pendidikan yang lebih luas, dan kemampuan berfikir anak masih dalam taraf rendah.

C. Korelasi Antara Partisipasi Masyarakat dengan Perkembangan Pendidikan Keagamaan Tingkat Dasar

Lembaga pendidikan (sekolah) merupakan bagian dari masyarakat dari masyarakat yang diciptakan oleh masyarakat dan untuk masyarakat itu sendiri. Sekolah adalah milik masyarakat dan berada ditengah-tengah masyarakat, sekolah dipandang sebagai sistem yang terbentuk dalam suprasistem.

Hal ini menunjukkan adanya hubungan yang erat antara sekolah dengan masyarakat sekitarnya, yang mengharuskan keduanya menjalin hubungan kerja sama, saling memberi dan saling menerima. Hal ini dibutuhkan untuk menjaga agar sistem atau lembaga itu tidak mudah punah

atau mati.

Sekolah dan masyarakat adalah dua lingkungan hidup yang tidak dapat dipisahkan, sekolah sebagai tempat belajar untuk merealisasikan apa yang dicita-citakan masyarakat tentang pengembangan putra-putra mereka. Hal ini menunjukkan ketidak mampuan orang tua membina sendiri anak-anak mereka agar dapat tumbuh dan berkembang secara total, integratif dan optimal seperti yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia. Itulah sebabnya lembaga pendidikan mengambil tugas ini. Sedangkan masyarakat tempat mengaplikasikan dan memetik hasil belajar.

Pada hakekatnya sekolah melaksanakan fungsi rangkap terhadap masyarakat, yaitu memberi layanan (fungsi layanan) dan sebagai agen pembaharu atau penerang (fungsi pemimpin). Disebut fungsi layanan karena sekolah bertugas melayani kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Dan disebut fungsi pemimpin, karena lembaga ini memimpin masyarakat dengan penemuan-penemuannya untuk memajukan kehidupan bangsa.³⁹

Merupakan lembaga yang berfungsi sebagai agen pembaharu terhadap masyarakatnya ia hendaknya mengikut sertakan masyarakat agar pekerjaannya menjadi efektif. Setiap aktifitas pendidikan, terutama yang bersifat inovatif sepatutnya dikomunikasikan terlebih dahulu dengan

³⁹Ibid.

masyarakat (orang tua). Suatu lembaga pendidikan jika tidak menjalin kerjasama dengan masyarakat berarti tidak lagi berfungsi sebagai penerang dan pembaharu masyarakat. Begitu pula sebaliknya, jika masyarakat tidak lagi memberi dukungan moral dan material kepada lembaga pendidikan, berarti sama dengan tidak menghiraukan perkembangan anak-anak mereka.

Dr. Made Pidarta dalam buku "Perencanaan Pendidikan Partisipatori", mengemukakan bentuk hubungan antara lembaga pendidikan dan masyarakat dapat dilakukan sebagai berikut :

- a. Rencanakan hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat dan monitor hubungan itu dilakukan oleh suatu team yang terdiri dari wakil-wakil pengajar dan orang tua.
- b. Tentukan frekwensi dan efektifitas komunikasi
- c. Memotifasi personalia sekolah untuk berpartisipasi.
- d. Memotifasi para orang tua (masyarakat) untuk berpartisipasi dalam program hubungan dengan lembaga pendidikan dan menyarankan mereka untuk ikut mengambil keputusan.
- e. Libatkan orang tua dalam perencanaan tentang pendidikan putra-putra mereka.
- f. Libatkan para orang tua (masyarakat) dalam pemecahan masalah yang berkaitan dengan performance putra-putra mereka.

- g. Beri dorongan kepada orang tua agar ikut mendidik putra-putra mereka.
- h. Lembaga pendidikan harus melaporkan kemajuan siswa kepada orang tua secara teratur dan bermakna.⁴⁰

Sekolah dalam mengadakan hubungan dengan masyarakat masing-masing dapat mengambil manfaat dari kegiatan tersebut. Adapun manfaat yang diperoleh dari kedua belah pihak antara lain :

a. Bagi Masyarakat :

1. Mengetahui hal-hal tentang sekolah dan inovasi-inovasinya.
2. Kebutuhan-kebutuhan masyarakat tentang pendidikan lebih mudah diwujudkan.
3. Menyalurkan kebutuhan berpartisipasi dalam masyarakat.
4. Melakukan tekanan atau tuntutan terhadap sekoalah.

b. Bagi Sekolah :

1. Memperbesar dorongan mawas diri.
2. memudahkan memperbaiki pendidikan.
3. Memberbesar usaha meningkatkan profesionalisme staf.
4. Konsep masyarakat tentang guru menjadi benar.
5. Mendapatkan koreksi dari kelompok penuntut.
6. Mendapatkan dukungan moral dimasyarakat.
7. Memudahkan meminta bantuan dan material dari masyarakat.
8. Memudahkan pemakaian media pendidikan di masyarakat.
9. Memudahkan pemanfaatan nara sumber.⁴¹

Bentuk dukungan masyarakat yang paling penting adalah moral.

Dukungan material tanpa disertai dukungan moral dapat mengacaukan

⁴⁰Dr. Made Pidarta, *Perencanaan Pendidikan Partisipatori*, Cet. II, Jakarta, Rineka Cipta, 1990, Halaman 35-36

⁴¹Ibid.

pembangunan pendidikan. Untuk menghindari kemungkinan yang negatif, perlu diciptakan dan dihidupkan kegotong-royongan dengan masyarakat sebagai suatu tindakan adat kebudayaan yang sangat baik sejak dulu.

Dengan didasari oleh suasana gotong royong serta dukungan moral yang positif, sekolah lebih mudah meminta dana tambahan dan material dari masyarakat, karena mereka merasa dihargai, diikutsertakan dalam pembinaan pendidikan dan merasa ikut memiliki sekolah tersebut.

Mengacu dari uraian diatas, boleh jadi perkembangan yang terjadi pada pendidikan keagamaan tingkat dasar di desa Kenanten Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto, adalah tidak lepas dari peran serta masyarakat juga. Apalagi masyarakat desa yang kecenderungannya terhadap agama masih kuat. Dukungan masyarakat bisa berupa material dan yang lebih utama adalah dukungan moral yang disertai rasa tanggung jawab yang besar.